

MODUL
KEHIDUPAN BANGSA INDONESIA PADA MASA ORDE
BARU SAMPAI REFORMASI
MATERI : KEHIDUPAN SOSIAL BANGSA INDONESIA PADA MASA
ORDE BARU SAMPAI REFORMASI



MOCH. ARIFIEN

PPG DALAM JABATAN
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
2018

A. Pendahuluan

Lahirnya era orde baru dilatarbelakangi oleh runtuhnya orde lama. Tepatnya pada saat runtuhnya kekuasaan Soekarno yang lalu digantikan oleh Soeharto. Salah satu penyebab yang melatarbelakangi runtuhnya orde lama dan lahirnya orde baru adalah keadaan keamanan dalam negeri yang tidak kondusif pada masa orde lama. Terlebih lagi karena adanya peristiwa pemberontakan G30S PKI. Hal ini menyebabkan presiden Soekarno memberikan mandat kepada Soeharto untuk melaksanakan kegiatan pengamanan di Indonesia melalui surat perintah sebelas maret atau Supersemar. Pemerintahan Soeharto sendiri bertahan selama 32 tahun dengan berbagai kebijakan yang dilakukan untuk mencapai cita-cita bangsa. Pada era ini pemerintahan Soeharto banyak memfokuskan pembangunan pada bidang perekonomian dan penguatan Pancasila. Soeharto kemudian mengundurkan diri pada tahun 1998 akibat pergerakan rakyat yang kemudian dikenal dengan gerakan reformasi. Reformasi merupakan gerakan yang dilakukan oleh rakyat bersama dengan mahasiswa untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi dan politik Indonesia. Puncak pimpinan berganti ke tangan B.J Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri pasca gerakan reformasi.

Modul ini terdiri dari beberapa bagian diantaranya: Pendahuluan; Capaian pembelajaran; Materi; Rangkuman; Tugas, Tes dan Daftar Pustaka. Proses pembelajaran untuk materi kehidupan sosial, ekonomi, politik masa orde baru sampai reformasi yang sedang anda ikuti saat ini, dapat berjalan dengan lebih lancar bila Anda mengikuti langkah-langkah belajar sebagai berikut ini:

1. Pahami dulu mengenai berbagai kegiatan penting dalam modul mulai tahap awal sampai akhir.
2. Lakukan kajian terhadap materi kehidupan masyarakat Indonesia pada masa orde baru hingga reformasi terlebih dahulu agar anda mendapat mendapat mengkonstruksi pengetahuan lebih detail.
3. Pelajari terlebih dahulu kegiatan belajar yang akan dilakukan.
4. Keberhasilan proses belajar Anda dalam mata diklat ini sangat bergantung kepada kesungguhan Anda dalam mengerjakan latihan. Untuk itu, berlatihlah secara mandiri atau berkelompok dengan teman sejawat.
5. Bila anda menemui kesulitan, silahkan hubungi instruktur/ widiaswara pembimbing atau fasilitator yang mengajar modul ini.

Baiklah saudara pengguna modul, selamat belajar, semoga anda sukses memahami pengetahuan yang diuraikan dalam modul ini untuk bekal anda bertugas dengan baik.

B. Capaian Pembelajaran

Capaian pembelajaran yang akan anda dapatkan setelah mempelajari modul ini adalah anda mampu menjelaskan kehidupan sosial, ekonomi dan politik pada masa orde baru sampai reformasi.

C. Sub Capaian Pembelajaran

Setelah anda mempelajari modul ini maka anda diharapkan akan memiliki kemampuan dalam hal menjelaskan kehidupan sosial masa orde baru sampai reformasi

D. Materi

Sebelum anda membaca materi, simak terlebih dahulu video mengenai Supersemar berikut ini terlebih dahulu.

<https://bit.ly/2JpJSmB>

1. Kehidupan sosial masa orde baru sampai reformasi

Peristiwa G30S PKI pada tahun 1965 yang terjadi di Jakarta menyebabkan stabilitas sosial dan politik Indonesia pada tingkat yang mengkhawatirkan. Peristiwa tersebut telah menimbulkan kemarahan rakyat. Keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau, keadaan perekonomian makin memburuk dimana inflasi yang cukup tinggi terhadap pelaku G30S PKI semakin meningkat.

Tidak hanya di Jakarta, di beberapa daerah juga melakukan terhadap PKI, banyak korban jiwa yang hilang akibat hal ini, mereka yang terdidikasi menjadi bagian dari PKI kemudian ditangkap dan tidak sedikit juga yang kemudian dibunuh tanpa mendapat kesempatan untuk membela diri. Para mahasiswa melakukan tuntutan kepada pemerintah pada era presiden Soekarno, Pada 10 Januari 1966 di depan gedung DPR-GR mahasiswa bersama rakyat mengajukan tuntutan “TRITURA” (Tiga Tuntutan Rakyat) yang berisi : (1) Pembubaran PKI beserta Organisasi Massanya, (2) Pembersihan Kabinet Dwikora, (3) Penurunan Harga-harga barang. Akhirnya, Tujuan dari Tri Tuntutan Rakyat dapat terwujud dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) yang memerintahkan kepada Mayor Jenderal Suharto untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia dan ormas-ormasnya.

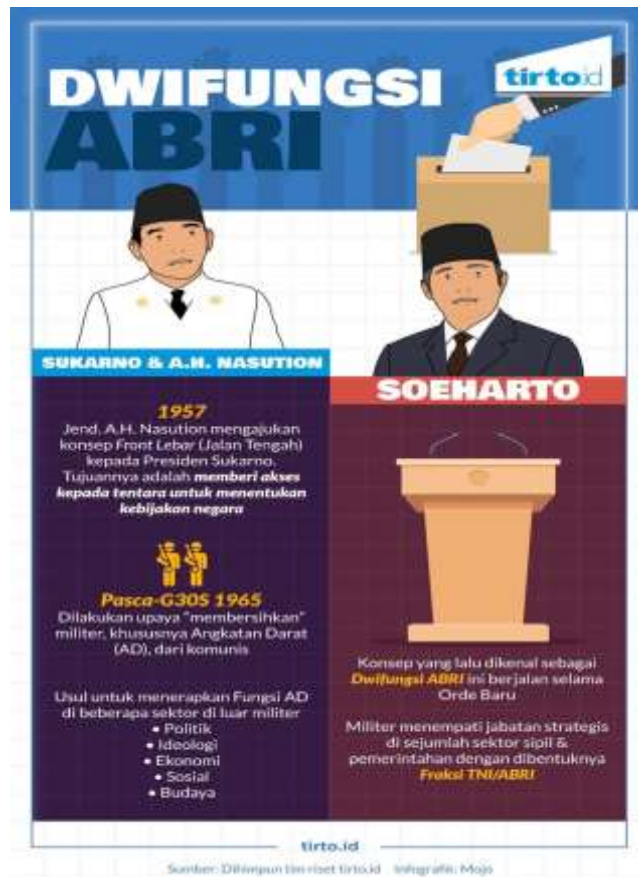


Gambar 1. Gerakan Tritura

Sumber : <https://bit.ly/2HWL3u2>

Selain itu, Supersemar juga mengamanatkan agar meningkatkan perekonomian Indonesia sehingga dapat terwujud kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Supersemar yang hingga kini masih menyisakan misteri karena ditemukan adanya tiga versi supersemar. Supersemar kemudian menjadi alat naiknya Soeharto menjadi Presiden menggantikan Soekarno. Perjalanan Indonesia menjadi sebuah bangsa yang berdaulat dilanjutkan oleh Presiden Soeharto.

Pada awal-awal masa memimpin beliau berusaha memperbaiki permasalahan yang timbul pada masyarakat di era Soekarno, terutama dalam hal ideologi dan keamanan. Beberapa kebijakan yang dibuat oleh Soeharto tentunya sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Masalah keamanan menjadi prioritas Soeharto pada saat itu mengingat kondisi yang dirasakan oleh masyarakat akibat dari peristiwa G30S PKI begitu besar. Pemerintah Orde Baru memperluas kekuasaan mereka atas kehidupan sosial masyarakat melalui tentara. ABRI memiliki struktur organisasi yang menempatkan mereka sampai ke desa-desa. Dengan struktur ini, ABRI mengawasi dan mempengaruhi seluruh kehidupan sosial warga negaranya. Tidak mengherankan ABRI bisa menyusup ke dalam kelompok-kelompok sosial untuk memastikan bahwa mereka tidak membahayakan negara. Sementara karena masyarakat semakin lama semakin tidak memiliki kesadaran politik, maka hubungan sosial antar sesama warga bersifat steril terhadap politik. Pemerintah juga saat itu menjalankan program Dwi Fungsi ABRI dalam praktek kehidupan sosial politik.



Gambar 2. Info Grafis Dwi fungsi ABRI

Sumber : <https://bit.ly/2HmuLha>

Militer adalah suatu alat pertahanan negara sebenarnya telah mempunyai konsep yang baik dalam perannya menjaga stabilitas Politik dan keamanan di dalam negeri, yaitu Dwi Fungsi ABRI. Dwi Fungsi ABRI merupakan sebuah konsep dasar militer dalam menjalankan peran sosial politik mereka di negeri ini. Dwi Fungsi ABRI yang diketahui masyarakat di luar lingkungan ABRI adalah sebagai sebuah bentuk militerisme, campur tangan militer dalam permasalahan politik, campur tangan militer dalam permasalahan-permasalahan negara lainnya yang penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Dwi Fungsi ABRI dilihat sebagai sebuah intervensi militer dan legitimasi militer untuk melakukan tindak kekerasan terhadap rakyat. Dwi Fungsi berarti masuknya militer dalam posisi-posisi/jabatan-jabatan penting dan mengurangi jatah orang-orang sipil. salah satu bentuk perwujudan fungsi ABRI sebagai kekuatan sosial politik adalah penugasan prajurit ABRI dalam lembaga, instansi, badan atau organisasi di luar jajaran ABRI. Alasan utama

pada awalnya adalah untuk mengamankan bangsa dari segala pengaruh komunisme. Tetapi selanjutnya, penugasan itu dimaksudkan pula untuk menyukseskan program pembangunan Orde Baru.

Peran besar militer dalam kehidupan masyarakat di era orde baru berdampak pada banyak dibungkamnya hak-hak rakyat. Jika mereka melakukan kritik kepada pemerintah maka akan dianggap sebagai bentuk perlawanan kepada negara, sehingga hak rakyat untuk memberikan pendapat sangat berkurang. Hak untuk berserikat dan berkumpul juga dibatasi pada era orde baru. Dalam hal kebudayaan Pemerintah Orde Baru mendefinisikan kebudayaan nasional sebagai puncak-puncak kebudayaan daerah. Dengan demikian, kebudayaan daerah yang dianggap bertentangan atau membahayakan kebudayaan nasional akan dihapus atau dilarang. Pemerintah juga mengontrol kerja dan produksi kebudayaan. Seniman tidak bisa seenaknya menghasilkan karya seni. Karya seni yang membahayakan Pancasila dan UUD akan dilarang. Demikian pula dengan pementasan drama atau teater. Semuanya harus ada izin tertulis dari aparat keamanan, Selain itu isi pementasan atau isi puisi harus dikontrol.

Kehidupan sosial masyarakat pada era orde baru pada kenyataannya banyak dikontrol oleh pemerintah, hal tersebut tentunya menimbulkan perlawanan dari rakyat. Mereka merasa hak mereka untuk mendapatkan kehidupan merasa dibatasi dan tidak dapat berkembang, hanya orang-orang yang dekat dengan pemerintah yang mendapat kemudahan. Pada tahun 1997 terjadi krisis ekonomi yang kemudian menjadi krisis multidimensional. Puncaknya pada tahun 1998 yang dipelopori oleh mahasiswa terjadi gerakan untuk menurunkan Soeharto, gerakan tersebut kemudian dikenal dengan gerakan reformasi.

Pada tahun 1998 dalam upaya menuntut mundur Soeharto juga diwarnai dengan pertumpahan darah, banyak korban dari mahasiswa yang dilakukan oleh militer yang mendukung pemerintah. Konflik rasial juga muncul pada tahun tersebut. Rakyat terbagi menjadi dua kelompok yakni pribumi dan non pribumi (yang mayoritas etnis chine). Kelompok pribumi menganggap selama ini kelompok non pribumi merugikan mereka, sehingga muncul tindakan pengerusakan dan pembakaran serta penjarahan terhadap tempat-tempat usaha kelompok non pribumi. Pemerksaan terhadap perempuan-perempuan kaum

non pribumi juga banyak terjadi, akibatnya banyak terjadi eksodus besar-besaran yang dilakukan oleh kaum non pribumi meninggalkan Jakarta dan juga Indonesia, karena tidak mendapat jaminan keamanan.

Gerakan reformasi pada akhirnya mencapai hasilnya dengan mundurnya Soeharto dari posisi presiden yang kemudian digantikan oleh B.J. Habibie. Pada era ini masalah sosial masih belum mengalami perubahan yang berarti, mengingat hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi perekonomian yang masih belum stabil. Namun kebebasan rakyat untuk menyampaikan pendapat, berserikat dan berkumpul sudah dikembalikan, peran militer juga mulai dikurangi, sehingga tidak menimbulkan rasa ketakutan pada rakyat. Habibie menjadi presiden tidak terlalu lama, pidato pertanggungjawabannya pada tahun 1999 ditolak oleh MPR sehingga dia harus kehilangan jabatannya yang kemudian digantikan oleh Abdurrahman Wahid melalui mekanisme voting oleh MPR/DPR.

Pada era Abdurrahman Wahid atau yang bisa dikenal dengan sebutan Gusdur ini dalam kehidupan sosial terutama masalah rasial mulai diselesaikan. Kebijakan awal pemerintahan Abdurrahman Wahid adalah membubarkan Departemen Penerangan. Dimasa Orde Baru Departemen penerangan merupakan alat bagi Presiden Soeharto untuk mengekang kebebasan pers, dengan dibubarkannya Departemen tersebut maka kebebasan pers di Indonesia semakin terjamin. Kemudian ada juga kebijakan untuk mencabut TAP MPR-RI tentang larangan terhadap Partai Komunis, ajaran Marxisme, Leninisme, dan Komunisme. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur merupakan bapak Pluralisme di Indonesia, hal itu dikarenakan semasa hidupnya Abdurrahman Wahid selalu membela kaum minoritas dan sangat anti dengan yang namanya kekerasan dan ketidakadilan. bahkan dengan gagahnya Abdurrahman Wahid berani meresmikan agama baru yaitu Konghucu menjadi agama resmi di Indonesia. Namun disayangkan pluralisme di dalam kehidupan bangsa Indonesia yang ingin diwujudkan oleh Abdurrahman Wahid sempat mengalami permasalahan dikarenakan terjadinya kerusuhan berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan seperti adanya kerusuhan Sampit yaitu pertikaian antara suku Dayak dan Madura yang banyak memakan korban jiwa dan kerusuhan ini terjadi pada tanggal 27 Februari 2000.

Setelah dilantik menjadi Presiden, Gus dur dihadapi pada persoalan konflik di beberapa daerah di Indonesia. Menghadapi hal itu, setelah pengangkatan dirinya sebagai Presiden, Abdurahman Wahid. melakukan pendekatan yang lunak terhadap daerah-daerah yang berkecamuk. Terhadap Aceh, Abdurahman Wahid. memberikan opsi referendum otonomi dan bukan kemerdekaan seperti referendum Timor Timur. Pendekatan yang lebih lembut terhadap Aceh dilakukan Abdurahman Wahid. dengan mengurangi jumlah personel militer di Negeri Serambi Mekkah tersebut. Netralisasi Irian Jaya, dilakukan Abdurahman Wahid. pada 30 Desember 1999 dengan mengunjungi ibukota Irian Jaya. Selama kunjungannya, Presiden Abdurahman Wahid berhasil meyakinkan pemimpin-pemimpin Papua bahwa ia mendorong penggunaan nama Papua. Tingginya harga barang-barang kebutuhan pokok saat itu membuat sebagian besar masyarakat Indonesia kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka.

Pada tahun 23 Juli 2001 Megawati dilantik menjadi Presiden setelah Gusdur dianggap melanggar konstitusi setelah mengularkan dekrit presiden. Salah satu permasalahan utama dalam pemerintahan Megawati Soekarnoputri adalah kondisi Indonesia yang belum stabil. Pada saat itu Indonesia sedang dalam krisis multidimensional. Dimana, sebagian krisis itu merupakan bagian dan kelanjutan dari krisis moneter, krisis ekonomi, krisis kepercayaan, krisis politik, dan krisis keamanan yang telah melanda sejak tahun 1997. Konflik antar kelompok yang muncul diberbagai daerah beberapa tahun terakhir, sehingga kebijakannya adalah mempercepat penyelesaian konflik antar kelompok masyarakat yang marak terjadi periode tahun 1998-2000. Untuk menyelesaikan konflik itu, diterapkan berbagai pendekatan, baik bersifat politik, sosial, maupun kultural. Karena NKRI merupakan “harga mati” maka pemerintah akan bersikap tegas terhadap siapapun yang akan mengganggu kedaulatan maupun persatuan dan kesatuan bangsa.

Untuk menyelesaikan konflik Aceh misalnya, pemerintahan Megawati memberikan status otonomi khusus pada Aceh dan Papua sehingga konflik dengan GAM di Aceh dan dengan OPM di Papua dapat diselesaikan. Selain masalah konflik di daerah, pada era Megawati juga terjadi berbagai peristiwa terorisme di berbagai lokasi dengan latar belakang agama. Beberapa contoh tindak terorisme yang terjadi antara lain Aksi pengeboman di Legian, Kuta Bali

pada tanggal 12 Oktober 2002, disusul dengan pengeboman Hotel George.W. Marriot Jakarta. Kedua aksi pengeboman tersebut yang menimbulkan kerugian bagi pemerintah secara material dan berakibat puluhan orang tewas.



Gambar 3. Bom Bali I

Sumber : <https://bit.ly/2qULSM1>

Aksi terorisme ini telah menjadi ancaman bagi Indonesia, untuk itu pemerintah berusaha untuk melindungi segenap masyarakat yang ada di Indonesia dan melakukan perlawanan terhadap terorisme. Perlu kiranya disadari bahwa aksi terorisme bukanlah sekedar tindak pidana biasa. Ini merupakan kejahatan luar biasa yang masuk kedalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan. Mengingat dampak atau akibat yang ditimbulkan dari suatu aksi terorisme tidak terbatas pada korban jiwa, harta benda, sarana dan prasarana umum. Aksi terorisme amat berpotensi memusnahkan lingkungan hidup, sumber-sumber ekonomi bahkan menimbulkan keguncangan sosial dan politik.